

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA BIRO HUKUM TAHUN 2017

A. KEDUDUKAN

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai unsur staf Biro Hukum mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I;
 - Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II;
2. Kepala Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum;
 - Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum;
 - Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan;
3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I;
 - Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II;
 - Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil III;

D. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

1. Jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum adalah sebanyak 33 orang yang terdiri atas 32 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang tenaga outsourcing (sopir).
2. Pangkat dan Golongan pegawai pada Biro Hukum adalah sebagai :
 - a. Pangkat
 1. Pembina Utama Muda : 1 orang
 2. Pembina : 4 orang
 3. Pembina Tingkat I : 3 orang
 4. Penata Tingkat I : 5 orang
 5. Penata : 3 orang
 6. Penata Muda Tingkat I : 9 orang
 7. Penata Muda : 5 orang
 8. Pengatur : 2 orang
 - b. Golongan
 1. Golongan IV c : 1 orang
 2. Golongan IV b : 3 orang
 3. Golongan IV a : 4 orang

4. Golongan III d : 5 orang
5. Golongan III c : 3 orang
6. Golongan III b : 9 orang
7. Golongan III a : 5 orang
8. Golongan II c : 2 orang

3. Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural yang terdapat pada Biro Hukum adalah sebanyak 13 orang, yang terdiri dari :

1. Kepala Biro : 1 orang
2. Kepala Bagian : 3 orang
3. Kepala Sub Bagian : 9 orang

E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pada Biro Hukum sudah memadai seperti pada masing-masing bagian sudah terdapat perlengkapan kantor yang cukup seperti meja, kursi, lemari buku dan perlengkapan pendukung lainnya.

F. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi Biro Hukum, yaitu “*Terwujudnya Produk Hukum dan Perlindungan Hukum*“, disusun program kerja dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017.

Pada tahun 2017, Biro Hukum melaksanakan 9 program dan 32 kegiatan dengan dukungan anggaran awal sebesar Rp. 2.595.541.344,- dan tambahan anggaran sebesar Rp.437.000.000,- (pergeseran anggaran yang terdiri dari pengurangan dan penambahan anggaran) sehingga total anggaran tahun 2017 menjadi Rp.3.032.541.344,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.342.770.744,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.5.000.000,-
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.3.000.000,-
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan dana sebesar Rp.6.000.000,-

- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp.17.420.500,-
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp.30.621.000,-
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp.18.900.000,-
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.5.040.000,-
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp.256.789.244,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.42.050.000,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Meubleur dengan dana sebesar Rp. 7.000.000,-
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.15.000.000,-
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.1.750.000,-
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, dengan dana sebesar Rp.3.300.000,-
- e. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi, dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.51.483.000,-.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.103.448.600,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.21.000.000,-
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp.82.448.600,-

5. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana Rp. 39.295.000,- dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan dana sebesar Rp. 8.967.000,-

- b. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan dukungan dana sebesar Rp. 30.328.000,-

6. Program Pembangunan Materi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.1.329.962.100,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, dan Pelatihan Legal Drafting dengan dana sebesar Rp.931.643.000,-
- b. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional dengan dana sebesar Rp.214.920.500,-
- c. Penyusunan Propemperda Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.116.942.000,-
- d. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.66.456.600,-

7. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.326.438.000,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi, dengan dana sebesar Rp.141.686.000,-
- b. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan dana sebesar Rp.65.247.000,-
- c. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dengan dana sebesar Rp.71.041.000,-
- d. Sosialisasi dan Monev RANHAM dengan dukungan dana sebesar Rp. 48.464.000,-

8. Program Sarana dan Informasi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.226.451.800,- melalui kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.130.445.000,-

9. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.666.648.900,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.177.099.000,-
- b. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.231.595.900,-
- c. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.257.954.000,-

G. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.342.770.744,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.333.745.013,- (97.37%) dengan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.800.750,- (96.02%), dengan hasil kegiatan terlaksananya jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.3.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.752.301,- (58.41%), dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Hal ini dikarenakan pembayaran biaya air dan listrik sesuai kebutuhan setiap bulan.
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.706.000,- (78.43%) dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp.17.420.500,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.368.600,- (99.70%), dengan hasil kegiatan tersedia dan termanfaatkannya alat tulis untuk keperluan kantor.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp.30.621.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.30.558.725,- (99.80%), dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp.18.900.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.900.000,- (100%), dengan hasil kegiatan terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.5.040.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.030.000,- (40.28%), dengan hasil kegiatan terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat. Penyelenggaraan rapat yang dilakukan sesuai kebutuhan setiap bulannya.

- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp.256.789.244,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.253.628.637,- (98.77%), dengan hasil kegiatan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.42.050.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.31.945.181,- (75.970%) dengan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

- a. Pengadaan Mobileur dengan dukungan dana sebesar Rp. 7.000.000, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.250.000,- (75%) dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan mobileur (lemari) Biro Hukum.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.533.000,- (76.89%), dengan hasil kegiatan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.1.750.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.200.000,- (68.57%), dengan hasil kegiatan pemeliharaan service alat pendingin ruangan kantor.
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi dengan anggaran sebesar Rp.3.300.000 (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.650.000,- (50%). Kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan.
- e. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi dengan dukungan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (100%) realisasi anggaran sebesar Rp. 12.312.181 (82.08%).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.51.483.000,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.48.534.700,- (94.27%), dengan hasil terlaksananya kegiatan peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dimana pengiriman peserta dilakukan dengan selektif terhadap siapa penyelenggaranya, apa materi/substansinya dan apa manfaatnya bagi organisasi dan pengiriman peserta berdasarkan undangan dari instansi terkait.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.103.448.600,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.101.675.200,- (98.17%) melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.21.000.000,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.548.800,- (93.09%) dengan hasil terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp.82.448.600,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.82.126.400,- (99.47%) dengan hasil terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD.

5. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 39.295.000,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.280.000,- (61.79%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan dana sebesar Rp. 8.967.000 (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.867.000 (98.88%).
- b. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan dukungan dana sebesar Rp. 30.328.000,- (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.413.000,- (50.82). Pelaksanaan realisasi kegiatan ini dilakukan sesuai kebutuhan.

6. Program Pembangunan Materi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp. 1.329.962.100,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.219.210.020,- (91.67%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, dan pelatihan legal drafting dengan dana sebesar Rp.931.643.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.870.756.620,- (93.45%) dengan hasil terlaksananya kegiatan sebagai berikut :
 - i. Rapat-rapat pembahasan rancangan produk hukum daerah.
 - ii. Telah mendampingi kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pendalaman materi Ranperda.

- iii. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait.
- iv. Telah ditetapkan produk hukum daerah sebagai berikut :
- Peraturan Daerah Tahun 2017 sebanyak 13 Perda yaitu :
 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
 - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengusahaan Air Tanah
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketenagalistrikan
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
 - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
 - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Menjadi Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat
 - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
 - Peraturan Gubernur sebanyak 121 buah
 - Keputusan Gubernur sebanyak 1204 buah
 - Instruksi Gubernur sebanyak 3 buah
 - Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sebanyak 64 buah
- b. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional dengan dana sebesar Rp. 214.920.500,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.181.779.100,- (84.58%) dengan hasil kegiatan:
- i. Terlaksananya rapat-rapat dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum nasional (produk hukum yang lebih tinggi), dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
 - ii. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian terkait.
- c. Penyusunan Propemperda Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.116.942.000,- dengan realisasi fisik sebesar (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.103.973.300,- (88.91%) dengan hasil kegiatan terlaksananya Rapat Koordinasi Program Pembentukan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 15 Agustus 2017 yang diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, dengan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Propemperda Tahun 2017 dan Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Tujuan rapat koordinasi ini agar pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas sesuai dengan kewenangan, kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Daftar usulan Ranperda Pemerintah Daerah Tahun 2017 :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
 - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
 - c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
 - d. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
 - e. Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - f. Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - g. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
 - h. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - i. Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat
 - j. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - k. Pengelolaan Sampah
 - l. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - m. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan
 - n. Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
 - o. Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
 - p. Nagari
 - q. Pencegahan Pengagulangan Narkotika
- d. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.66.456.600,- dengan realisasi fisik sebesar (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.701.000,- (94.53%) dengan hasil terlaksananya kegiatan konsultasi dan klarifikasi Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah serta penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri.

7. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.326.438.000,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.274.026.750,- (83.94%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi, dengan dana sebesar Rp.141.686.000,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.115.489.000,- (81.51%) dengan kegiatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri sebanyak 11 perkara, dengan rincian :

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT	TERGUGAT				
	1	2	3	4	5	6	7
PERKARA PERDATA							
1.	Perkara Perdata No.255/Pdt.G/2015/PN. JKT.TIM	PT.Bangun Kharisma Prima	Kepala Kantor Penghubung Prov.Sumatera Barat (Tergugat I) dan Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar (Hotel Balairung)	Dalam Proses Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta sejak relas pemberitahuan permohonan Banding tanggal 9 Agustus 2016	Banding Oleh Penggugat	Putusan Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2016, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Agustus 2016
2.	Perkara Perdata No.150/Pdt.G/2015/PN. PDG	Dra.Tutik Indriani,Apt	Dinas PSDA Sumbar (Tergugat II) Bank CMB Niaga (Tergugat I)	Pekerjaan Perbaikan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Inkracht	Kasasi Oleh Penggugat	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2017, Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra.Tutik Indriani,Apt
3.	Perkara Perdata No.156/Pdt.G/2015/PN. PDG	Yusriwan Syahar,B.sc.	Dinas Pendidikan Prov.Sumbar (Tergugat II)	Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai	Dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi	Banding Oleh	Putusan Pengadilan Negeri Padang tgl 2 Mei 2016 menyatakan Gugatan Penggugat

				Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2009 Nomor : 46181/A4.6/KP/2019 tertanggal 3 Agustus 2009	Padang	Penggugat	Tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini.
	1	2	3	4	5	6	7
4.	Perkara Perdata No.3/Pdt.G/2017/PN.PMN	Abu Syofyan, SH	Gubernur Sumatera Barat (Termohon Keberatan 2)	Penetapan ganti kerugian atas tanah bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan	Inkracht	Kasasi Oleh Penggugat	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2017, Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Abu Sofyan, SH
5.	Perkara Perdata No.35/Pdt.G/2017/PN.PMN	Zulkifli, B.Sc	- Pengguna Anggaran RSUD Pariaman (Tergugat II) - Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Pariaman (Tergugat III)	Perbuatan melawan hukum atas penerbitan Daftar Hitam An. PT.Multi Sindo International Cabang Padang	-	-	Putusan dicabut oleh Penggugat setelah proses mediasi oleh kedua belah pihak yang dipimpin oleh hakim mediator.

			<ul style="list-style-type: none">- Inspektorat Prov.Sumbar (Tergugat IV)- Badan Keuangan Daerah Prov.Sumbar (Tergugat V)				
--	--	--	--	--	--	--	--

- b. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan dana sebesar Rp.65.247.000,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.60.134.150,- (92.16%). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari keadilan melalui Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin tahun 2017 yang diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang melakukan pendampingan perkara sebagai berikut :

No	JENIS PERKARA	PENGGUGAT/ STATUS	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANG AN	TARGE T
1.	Perkara Perdata Nomor 516/PF.Pdt/X/2016/ PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	-	PT. Bumi Sarimas Indonesia/Tergugat	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.	Perkara
2.	Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	-	PT. Elnusa Pertopin/Terbugat	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat	
3.	Perkara Pidana Nomor 235/Pid.B/2017/PN.P DG di Pengadilan Negeri Kas IA Padang.	-	Muhammad Azlan/Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat (PBHI).	
4.	Perkara Pidana Nomor 182/Pid.B/2016/PN.P DG di Pengadilan Negeri Padang Klas IA Padang.	-	Iswandi/Terdakwa	Pidana (Tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat)	Pendampingan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat (PBHI).	

5.	Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.sus-PHI/2017/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	-	PT. Pos Indonesia (Persero)	Perkara Hubungan Industrial	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
6.	Perkara Pidana No.34/Pid.B/2017/PN.PSB di Pengadilan Negeri Pasaman Barat	-	ENDRIZAL/Terdakwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Perkumpulan Kantor Hukum Fiat Justitia

- c. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dengan jumlah dana sebesar Rp.71.041.000,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.59.313.300,- (83.49%), dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2017 pada tanggal 17 November 2017 yang diikuti oleh 50 orang peserta dari SKPD Provinsi dan Bagian Hukum Kab/Kota dengan narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi mengenai permasalahan hukum di daerah sehingga dapat mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.
- d. Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Dan HAM, dengan dukungan dana sebesar Rp. 48.464.000 (100%), dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.090.300 (80.66%) dengan kegiatan terlaksananya kegiatan monitoring rencana aksi HAM kab/kota.

8. Program Sarana dan Informasi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan jumlah dana sebesar Rp.130.445.000,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.114.050.597,- (87.43%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.130.445.000,- realisasi fisik (100%) realisasi keuangan sebesar Rp.114.050.597,- (87.43%) dengan kegiatan pembuatan Lembaran Daerah Tahun 2017 sebanyak 100

buah buku, Lembaran Lepas 100 eksemplar, dan 100 buah buku Berita Daerah.

9. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.666.648.900,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.628.527.441,- (94.28%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.177.099.000,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.166.087.641,- (93.78%) dengan hasil terlaksananya kegiatan :
 1. Pembahasan dan pengkajian (evaluasi) rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan sebanyak 37 rancangan perda Kabupaten/Kota.
 2. Koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat terkait permasalahan yang dihadapi terhadap produk hukum kabupaten/kota.
 3. Pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- b. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.231.595.900,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.210.448.500,- (90.87%) dengan hasil terlaksananya kegiatan :
 1. Pembahasan dan pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 53 peraturan daerah.
 2. Koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
 3. Pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- c. Klarifikasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.257.954.000,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.251.991.300,- (97.69%) dengan hasil terlaksananya kegiatan pembahasan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 115 Peraturan Kepala Daerah.

Demikian Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Tahun 2017 ini dibuat, dan dari uraian yang disajikan diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun 2017.

PLH. KEPALA BIRO HUKUM

ARDANIS, SH

Pembina

NIP. 19610117 199003 1 003